PENILAIAN KINERJA DAN INDEPENDENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA OLEH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI DI KOTA YOGYAKARTA

(Studi Deskriptif Statistik Penilaian Terhadap Kinerja dan Independensi KPI Oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Yogyakarta).

NASKAH PUBLIKASI

Disarikan dari Skripsi yang Diajukan untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh:

SYAUQI KHAIRUSY RAMADHANA

NIM: 13321081

Dosen Pembimbing Skripsi :

Drs. Ahmad Muntaha, M .Si

NIDN 0527056401

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

2018

Naskah Publikasi

PENILAIAN KINERJA DAN INDEPENDENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA OLEH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI DI KOTA YOGYAKARTA

(Studi Deskriptif Statistik Penilaian Terhadap Kinerja dan Independensi KPI Oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Yogyakarta).

Disusun oleh:

SYAUQI KHAIRUSY RAMADHANA

NIM: 13321081

31 JUL 2018

Telah disahkan oleh dosen pembimbing skripsi pada : .....

Dosen Pembimbing Skripsi,

Drs. Ahmad Muntaha, M .Si

NIDN 0527056401

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Muzayyin Nazaruddin, S.Sos., M.A

NIDN 0516087901

STEREOTIPI KEPADA KOMISI PENYIARAN OLEH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI DI KOTA YOGYAKARTA

(Analisis Survei Mengenai Penilaian Terhadap Kinerja dan Independensi KPI Berdasarkan Penilaian Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Yogyakarta)

Syauqi Khairusy Ramadhana

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII,

menyelesaikan studi pada tahun 2018

Ahmad Muntaha

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

ABSTRACT

The purpose of this studies was to know how stereotypes of Communication Science students in the city of Yogyakarta, regarding the performance of KPI in maintaining the quality of broadcast by doing some activities, for example is the standarization of censorship. This research is based on the decreasing of KPI image among public, and this research also want to know whether or whether not has difference of opinion between public with Student of Communication Science which usually have more knowladge in broadcast television and broadcasting regulation. Based on the above information, the researcher concludes the method to be used in this research is quantitative research method, with data collection technique in the form of survey to Communication Student in Yogyakarta which has been determined by sampling, and this study will be conducted for six months.

Keywords : Assesment, Performence, Independent, Indonesia broadcasting commission.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat mengalami kemajuan, dengan kemajuan teknologi tersebut manusia sangat dibantu dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari kegiatan perekonomian hingga dunia informasi. Awalnya daerah yang dulunya susah mengakses teknologi dan informasi, kini sudah tidak begitu banyak. Teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat cepat adalah teknologi informasi, perubahan teknologi informasi yang sangat pesat mempengaruhi semua aspek kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi hingga kehidupan sosial sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi informasi tersebut. Teknologi yang awalnya sederhana seperti ditemukan gambar bergerak hingga yang mutakhir saat ini yaitu televisi digital.

Televisi sudah menjadi kebutuhan penting dari masyarakat di berbagai negara maju, namun bagaimana kah efek dari hadirnya teknologi informasi di negara berkembang. Hadirnya teknologi di negara yang berkembang sangat membantu kegiatan masyarakat dalam kehidupannya mulai dari masalah pendidikan hingga hiburan, teknologi informasi sangat mempengaruhi penyebaran informasi tersebut namun dari segala kemampuan teknologi yang membantu kehidupan masyarakat, ada dampak yang menguntungkan maupun merugikan.

Dampak yang menguntungkan dengan adanya teknologi informasi adalah dapat mencari informasi dengan mudah karena adanya televisi dan internet, dan salah satu contoh dampak buruk dengan adanya teknologi informasi adalah memudahkan pengaksesan konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi, yang hingga akhirnya akan memberi contoh yang buruk anak-anak.

Untuk di Indonesia sendiri yang nota bene-nya merupakan negara berkembang sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan yang paling pesat di Indonesia terletak di dunia siaran dan telekomunikasi. Dunia siaran terutama televisi yang merupakan media yang paling digemari, masyarakat sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi informasi, contoh yang paling terlihat dari perkembangan tersebut adalah sudah bisanya masyarakat mengkonsumsi televisi via streaming. Masih ketergantungannya masyarakat Indonesia dengan televisi mengakibatkan munculnya berbagai konten yang diberikan kepada audiensnya, mulai yang dari sifatnya edukatif hingga yang sifatnya hiburan lengkap tersaji di pertelevisian indonesia. Konten yang berunsur eksplisit seperti perkelahian atau wanita yang berpakaian minim, konten vulgar atau eksplisit tidak hanya ditemui di program acara non-berita namu juga dapat ditemukan di program berita.

Adanya kemajuan teknologi televisi diharapkan dapat mencakup hampir di seluruh kepulauan Indonesia, menurut penelitian *AC Neilsen* media televisi masih menjadi media informasi yang paling digemari masyarakat diikuti dengan internet kemudian diikuti dengan radio (http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-jawa.html) Diakses 27 November 2016. Mengapa Televisi masih menjadi salah satu media massa paling digemari.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan mengapa televisi sangat digemari, media televisi menampilkan berbagai macam kebutuhan informasi mulai dari sosial hingga politik, terkadang juga televisi bisa membantu apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakatnya ini salah satu alasan mengapa masyarakat masih ketergantungan dengan televisi.

Masih ketergantungannya masyarakat Indonesia dengan televisi mengakibatkan munculnya berbagai konten yang diberikan kepada audiensnya, mulai yang dari sifatnya edukatif hingga yang sifatnya hiburan lengkap tersaji di pertelevisian indonesia. Konten yang berunsur eksplisit seperti perkelahian atau wanita yang berpakaian minim, konten vulgar atau eksplisit tidak hanya ditemui di program acara non-berita namun juga dapat ditemukan di program berita.

Dewasa ini para pengunggah konten lebih mementingkan rating ketimbang menampilkan konten yang bermutu, dengan rating yang tinggi tentu akan menguntung pihak konten. Dengan rating para pengunggah konten yaitu stasiun televisi, akan mengundang para pengikalan untuk mengiklankan produk mereka dan mendatangkan pundi pundi rupiah tanpa menghiraukan efek apa yang akan ditimbulkan, dari penayangan konten yang tidak layak tayang. Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan (Mahayoni, 2008) yaitu tidak bisa disangkal dampak lain yang muncul dari tayangan televisi yang terus menonjolkan konten eksplisit separti kekerasan, eksploitas seksual, horor, maupun mistik untuk sebuah alasan meraup atau menarik pengiklan.

Fenomena tersebut tentu merupakan masalah yang cukup serius karena bersangkutan dengan masa depan bangsa Indonesia, karna itu pemerintah membentuk badan yang mengawasi dunia penyiaran di Indonesia yaitu KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. KPI selaku badan yang mengawasi penyiaran indonesia sudah melakukan beberapa tindakan meminimalisir terpaparnya anak anak dengan konten yang belom patas di terima untuk anak-anak yaitu dengan melakukan sensorship, dilakukan sensor ini diharapkan akan mengurangi terpaparnya konten remaja-dewasa ke anak-anak sekolah.

Namun, akhir-akhir ini kegiatan KPI dalam mecegah konten yang tidak bermutu dinilai oleh masyarakat dan *netizen* sedikit berlebihan dan cenderung mengada-ngada. Sebenarnya konten yang harus disensor memiliki kriteria yaitu terdapat unsur kekerasan, menampilakan bagian tubuh tertentu, *disturbing picture* atau gambar yang eksplisit serta konten yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program.

Namun kinerja KPI dalam bentuk apapun akhir akhir ini sering dianggap masyarakat aneh dan salah sasaran, tayangan dalam bentuk animasi kartun hingga kontes kecantikan yang menggunakan kebaya ang notabenenya baju tradisional indonesia juga terkena sensor dan itu berbanding terbalik terhadap tayangan yang memiliki rating tinggi sedikit atau jarang dari ranah sensor indonesia.

Keterangan diatas menyebut kinerja KPI dianggap mulai tidak mencerminkan lembaga yang independen, dengan standarisasi sensor yang berlebihan justru dan salah target tersebut diduga akan menimbulkan masalah baru. Hal ini yang mendasari penelitian kali ini masyarkat berpendapat bahwa kinerja dan independensi Kpi sebagai lembaga pengawas KPI telah mengalami penurunan namun, bagaimana pendapat dari Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang mempelajari dunia pertelevisian, apa pendapat mereka mengenai KPI dan segala usahanya dalam meminimalisir terparparnya masyarakat dengan konten yang tidak ramah keluarga bentuk bentuk ketidak independesinya KPI dalam melakukan tugasnya, dan peneliti ingin melihat bagaimana menilai mahasisiwa ilmu komunikasi di kota Yogyakarta terhadap kinerja KPI dan juga ingin mengetahui bagaimana penilaian mahasisiwa ilmu komunikasi di kota Yogyakarta terhadap independensi kinerja KPI.

Tinjauan Pustaka

Pertama Jurnal dari Subhan Afifi dengan judul “Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia” penelitian ini juga sedikit membahas mengenai kinerja KPI, bagaimana KPI mengatasi pelanggaran dalam tayangan anak anak yang bermasalah. Berdasarkan jurnal tersebut terdapat 123 program acara yang terdaftar sebagai program yang bermasalah hasil dari jurnal tersebut mengatakan Sejauh ini walaupun belum optimal, KPI telahmenunjukkan perannya dalam menata sistem penyiaran Indonesia. Terkait dengan isi (content) siaran televisi, KPI melakukan pemantauan terhadap seluruh program siaran dari seluruh stasiun televisi yang ada. Berbagaiperingatan dan teguran diberikan oleh KPI terhadap stasiun televisi yang menyiarkan program siaran yang dinilai bermasalah dan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Kemudian yang kedua adalah jurnal dari Audy Amalia dengan judul “UPAYA TIM PRODUKSI PROGRAM TELEVISI PESBUKERS DALAM MEMINIMALISIR TEGURAN KPI” penelitian ini juga sedikit membahas mengenai kinerja KPI, berbagai peringatan diberikan oleh KPI terhadap stasiun televisi yang menyiarkan program anak yang dinilai bermasalah dan melanggar pedoman P3SPS, namun seringkali peringatan dari KPI dianggap tidak digubris oleh stasiun dan hal ini KPI sudah memiliki menjalankan tugasnya dengan baik baik.

Kemudian yang ketiga bersal dari skripsi Achmad Sofyan Hady dengan judul "Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Acara Silet pada Stasiun RCTI" penelitian ini juga sedikit membahas mengenai kinerja sekaligus bentuk dependen dan independensi KPI dari skripsi ini KPI sebagai lembaga independen mempertahankan kerja yang baik dalam mengawasi infoteimentkhususnya, dan segala jenis siaran pada televisi. di dalam penelitian kali ini KPI sngat mengawasi kegiatan siaran mengenai infoteiment namun kurang di jenis siaran yang lain.

Selanjutnya yang keempat berasal dari Jurnal Rahmat Edi Irawan dengan judul "PENTINGNYA PENONTON AKTIF DI ERA INDUSTRI TELEVISI INDONESIA SAAT INI" penelitian ini juga sedikit membahas mengenai independensi dan peran KPI sebagai regulator penyiaran dan bahwa KPI sebagai lembaga yang memiliki kinerja yang independen dengan dukungan feedback dari masyarakat, namun berdasarkan data dari penelitian mahasiswa masih mekelaskan KPI kedalam lembaga yang kinerja tidak sepenuhnya independen dalam makna yang positif.

a. Kerangka Teori

- Televisi dan Urgensi Lembaga Pengawas Penyiaran

    Televisi sebagai media komunikasi massa. media masa sendiri memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh media lain, televisi dapat menyampaikan sebuah informasi dengan menampilkan gambar dari informasi tersebut. televisi juga bisa menyampaikan informasi dihari yang sama dengan peristiwa atau tragedi yang nota bene-nya bahan dari informasi tersebut.

Penyampaian konten seolah seperti berlangsung pada saat pesan tersebut disampaikan. Selain itu televisi bisa lebih memberikan efek yang lebih menarik ketimbang radio, majalah atau koran. Namun, bagaimana industri pertelevisian di indonesia, untuk Indonesia sendiri industri pertelevisian sudah bisa dibilang maju teknologi analog sudah mulai ditinggalkan, walau masih ada saja yang menggunakan. Namun dapat dikatakan 80% sudah beralih ke teknologi digital, konten yang ditampilkanpun beragam mulai dari informasi hingga hiburan.

Konten yang disajikan saat dinilai mengalami penurunan, konten yang berbau perpeloncoan, tidak kekerasan serta tayangan yang kurang memiliki manfaatnya banyak tayang di televisi, dan hal ini menimbulkan pertanyaan apakah di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur hal seperti ini ?.

Jawabannya tentu ada, saat ini Indonesia masih menggunakan UU No.32 Tahun 2002 dan P3SPS sebagai acuan sistem penyiarannya namun apakah hal bisa menjamin bahwa konten yang akan ditampilkan televisi akan menjadi lebih baik. Tentu tidak untuk itu dibentuk lembaga pengawas yang mengawasi kegitan siaran di Indonesia yaitu KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kinerja dari KPI itu sendiri diharapkan bisa mengawasi kegitan siaran di indonesia agar konten yang diberikan tidak melanggar peraturan.

- Indepedensi Lembaga Pengawas KPI

Berdasarkan Undang-Undang no.32 tahun 2002 yang mengatur segala kegiatan penyiaran pada pasal 7 mengatakan KPI merupakan lembaga independen yang mengawasi segala kegiatan penyiaran. Namun ada pertanyaan yaitu apakah KPI benar benar lembaga yang independen.

Kemudian di jelaskan di buku “Industri Pertelevisian Indonesia” menyebutkan bahwa KPI dan KPID tidak mungkin bersifat Independen karena biaya operasional tergantung kepada APBN atau APBD (Effendy, 2008: 48) Jika independensi KPI merupakan independensi yang berpihak pada kepentingan publik atau masyarakat secara umum, maka siapa yang kemudian akan menjamin hal ini dapat tercapai? Apakah pemerintah? Permasalahannya adalah bahwa pemerintah Indonesia belum dapat dipastikan sepenuhnya membela kepentingan publik. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan susunan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang anggota partai politik tertentu.

Selain itu untuk independensi sendiri memiliki arti sikap mental yang tidak terpengaruh atau dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Penggunaan kata Independen yang di berada undang-undang no.32 tahun 2002 pada pasal 7 mungkin bukan mengertikan frase independen sebagai sesuai dengan KBBI, melainkan lembaga yang tidak terpengaruh oleh yang diawasi yaitu kegiatan siaran.

- Televisi, KPI, Penilaian Publik

  Bagaimanakah keadan televisi sekarang ?, saat ini televisi dipenuhi dengan banyaknya program non-berita contohnya seperti sinetron, reality show, talk show dan lain-lain, dengan bertambah banyaknya stasiun televisi semakin banyak konten yang diberikan kepada masyarakat atau audiens.

  Persaingan ini memacu kepada pihak-pihak pengusaha televisi agar memberikan konten yang fresh dan original walau pada akhirnya pihak dari stasiun televisi cenderung membeli program acaranya di sebuah rumah produksi, sehingga

konten yang diterima ada yang beberapa yang tidak layak tayang dan harus dipotong atau blur melalui proses editing sebelum ditayangkan.

Namun feedback yang diberikan masyarakat malah cenderung mencela hasil tersebut berikut merupakan contohnya :



Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah tipe Deskriptif kuantitatif dan menggunakan intrument berupa angket, pendekatan kuantitatif merupakan adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui angka dari Penilaian Terhadap Kinerja KPI Berdasarkan Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Yogyakarta. Survey dilakukan dengan mengambil sample dari suatu populasi, yaitu Mahasiswa aktif Ilmu komunikasi yang berada di kota Yogyakarta., paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivistik. Dimana, dalam paradigma ini menempatkan si peniliti untuk melihat penilaian objek yang diteliti secara objektif dan menghidari penilaian objek bersifat subjektif terhadap case atau kasus yang diteliti.

1. Jenis dan Sumber Data
    a. Data Kualitatif

        Merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dalam bentuk informasi dari instansi maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

    b. Data Kuantitatif

        Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung yang di dapatka dari angket.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui pencarian referensi diperpustakaan dan penelitian lapangan.

a. Pencarian Referensi di Perpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka seperti buku-buku yang memuat teori-teori, karya ilmiah dan bahan lain yang relevan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung di objek penelitian. Metode digunakan ada 2 jenis yaitu observasi dan angket, observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian, kuesioner yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan kepada Mahasiswa ilmu komunikasi di Yogyakart yang menjadi responden secara langsung untuk kemudian dijawab sesuai dengan kedaan 21 sebenarnya sehingga diperoleh informasi dengan realitas dan validitas setinggi mungkin.

Hasil dan Analisis

Dalam melakukan penelitian pada bab tiga ini, peneliti maupun pembaca akan mengetahui bagaimana penilaian Mahasiswa Ilmu komunikasi di Yogyakarta menilai KPI selaku regulator penyiaran dalam menjaga kualitas penyiaran indonesia yang pengkelasannya berdasarkan kinerja dan Independensi secara *numeric* atau dengan kata lain angka.

1. Penilaian Kinerja

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui penilaian Mahasiswa Ilmu komunikasi di Yogyakarta terhadap kinerja KPI adalah **Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Yogyakarta masih menilai Kinerja KPI belum memenuhi tugasnya sebagai regulator penyiaran hal ini dapat dibuktikan dari 7 item tolak ukur dan responden yang menjawab Tidak Setuju rata – rata memiliki persentase diatas 60% disetiap item pertanyaan yang diberikan dengan UII, UGM dan UMY sebagai universitas yang paling banyak menilai "Tidak Memuaskan" dengan persentase UII 23%, UGM 23% dan UMY 54%**. Hasil penelitian ini relevan dengan jurnal (afifi, 2010) dimana jurnal menujukan bahwa kinerja KPI sejak tahun 2009 hingga awal 2010 kinerja KPI mengalami penurun mulai dari bebasnya tayangan televisi sepanjang tahun 2009, pada tahun itu KPI memberikan teguran sebanyak 123 teguran kepada stasiun televisi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.

Namun yang sayangkan teguran yang diberikan bersifat umum paling banyak diberikan, dengan jurnal tersebut dikatakan bahwa kinerja kpi dinilai mengalami penurunan dan hal tersebut sesuai dengan hasil dari penelitian ini.

Penelitian ini bertolak belakang dari jurnal (amalia, 2012) dimana peneliti menyabutkan bahwa berbagai peringatan diberikan oleh KPI terhadap stasiun televisi yang menyiarkan program yang dinilai bermasalah dan melanggar pedoman P3SPS dinilai sudah cukup memenuhi tugas KPI, namun seringkali peringatan dari KPI dianggap tidak digubris oleh stasiun.berdasarkan skripsi tersebut kinerja kpi dinilai baik dan hal itu bertolak belakandengan hasil penelitian ini.

Berdasarkan data di atas data diatas juga menjelaskan adanya perbedaan definisi teori kinerja, penjelasan teori yang mengatakan kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Namun, penilaian kinerja yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi di yogyakarta membuktikan bahwa KPI belum menjalankan kinerjanya sebagai regulator penyiaran.

Jika ditarik kesimpulan maka penilaian kinerja KPI oleh mahasiswa ilmu komunikasi di yogyakarta dinilai belum baik hal ini dibuktikan oleh lebih dari 60%.

Kinerja KPI yang sekarang masih belum maksimal masih banyak tayangan yang mengandung unsur penghinaan atau perpeloncoan secara tidak langsung masih banyak tayang ditelevisi dan tindakan pencegahan untuk siaran yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan P3SPS masih minimum pemberiah surat peringatan dinilai tidak terlalu efektif. pada ujungnya peringatan tersebut hanya berlaku di beberapa hari setelah surat peringatan tersebut diberikan sampai saat ini, tindakan KPI yang berhasil menghentikan tayangan yang kurang mendidik adalah ketika KPI dapat menghentikan tayangan YKS namun itu juga bukan dari peran KPI seluruhnya melainkan juga organisai masyarakat yang meras tersunggung atas konten yang di tayangkan.

2. Independensi

Berdasarkan tabel frekuensi dari varibel Independensi maka dapat diketahui penilaian Mahasiswa Ilmu komunikasi di Yogyakarta terhadap kinerja KPI adalah **Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Yogyakarta masih menilai Kinerja KPI belum memenuhi tugasnya sebagai regulator penyiaran hal ini dapat dibuktikan dari 5 item tolak ukur dan responden yang menjawab Tidak Setuju rata – rata memiliki persentase diatas 70% disetiap item pertanyaan yang diberikan dengan UII, UGM sebagai universitas yang paling banyak menilai "Tidak Memuaskan" dengan persentase UII 40%, UGM 60% disetiap item pertanyaan**. Penelitan ini sedikit bertolak belakang dengan jurnal irawan (2013) dari jurnal tersebut mengatakan bahwa KPI sebagai lembaga yang memiliki kinerja yang independen dengan dukungan feedback dari masyarakat, namun berdasarkan data dari penelitian mahasiswa masih menilai KPI kedalam lembaga yang kinerja tidak sepenuhnya independen dan hal ini berbanding lurus dengan penelitian kali ini bahwa KPI belum sepenuhnya independen.

Berdasarkan data diatas, hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan definisi teori Independensi yaitu Suatu situasi dimana kita memilih untuk tidak terikat dengan pihak manapun dala melakukan kegiatan. Dalam penelitian ini dapat dikatakan kegiatan menjalankan kewajiban tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang no.32 tahun 2002 yang mengatur segala kegiatan penyiaran pada pasal 7 mengatakan KPI merupakan lembaga independen yang mengawasi segala kegiatan penyiaran dengan arti dalam memberikan hukuman kepada pelanggar KPI Tidak terpengaruh walau pun acara tersebut memiliki rating atau dimiliki orang yang bersangkutan dengan pemerintah.

Penindakan tegas sering dilakuan oleh tayang infotaiment yang buruk ataupun melanggar, aduan dari masyarakat mengenai tayangan infotaiment sangat didengar oleh KPI kemudian segra ditinjak lanjuti secara tegas namun hal itu berbanding terbalik dengan tayangan “reality” show atau sinetron yang banya unsur pelanggarannya dan memiliki unsur merusak moral terkesan dibiarkan. Pemberian surat peringatan kepada stasiun televisi yag bersangkutan terkasan diberikan untuk formalitas dan hingga saat ini belum ada sinetron yang memiliki rating yang tinggi yang biasanya memiliki banyak unsur kerasan dan pelanggaran seolah KPI menutup mata dari persoalan ini, padahal efek buruk dari sinetron tersebut sudah sangat bisa dihilihat dari perilaku masyarakat muda saat ini, lalu pemberian label sinetron tidak berkualitas oleh KPI belum memberi efek kepada tayangan sinetron tersebut.

Penutup

Penilaian kinerja KPI oleh mahasiswa ilmu komunikasi di yogyakarta menghasilkan pendapat bahwa kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan definisi teori yang digunakan yaitu kinerja. Menurut teori kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau organisai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Namun berdasarkan penilaian dari responden KPI belom sepenuhnya melaksanakan tanggu jawabnya hal itu dibuktikan dari 7 item tolak ukur memiliki hasil jawaban yang sama yaitu “Tidak Setuju” hal itu ditunjukan oleh didapatnya persentase lebih dari 60% di setiap item tolak ukur.

Untuk independesi KPI sendiri menurut mahasiswa ilmu komunikasi di yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan definisi teori independensi, menurut teori independensi suatu situasi dimana kita memilih untuk tidak terikat dengan pihak manapun dala melakukan kegiatan, namun berdasarkan penilaian dari responden KPI belom sepenuhnya melaksanakan tanggu jawabnya dengan independen hal itu dibuktikan dari 5 item tolak ukur memiliki hasil jawaban yang sama yaitu “Tidak Setuju” hal itu ditunjukan oleh didapatnya persentase lebih dari 70% di setiap item tolak ukur.

Penelitian ini memiliki keterbasan yaitu dengan masalah pengumpulan data yang singkat hingga tidak bisa rinci dalam membahas atau menjelaskan secara jelas kepada responden mengenai kasus yang sedang diangkat dan tidak bisa mewawancarai responden sampai mendalam dikarenakan alasan waktu responden dan peneliti yang terbatas, dan jumlah responden pada penelitian kali ini dikatakan belum memenuhi sepenuhnya perwakilan pendapat dari kalangan mahasiswa di kota yogyakarta,

dan penelitian yang bersifat kuantitatif ini seharusnya lebih bisa di perdalam atau lebih tepat dengan penelitian kualitatif dan dengan metode wawancara mendalam hingga dapat jawaban yang mendalam sehingga dapat jawabana yang akurat dan bisa di proses di analisis mendalam dan salah satunya adalah jangka waktu pengerjaan waktu skripsi sedikit.

Mengenai saran peneliti menyarankan untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyaringan konten televisi lebih intensif lagi dan KPI selaku regulator langsung memerikasa laporan yang masuk dan menetukan sikap, pada dasarnya pelibatan masyarakat dalam proses penyaringan konten televisi merupakan langkah yang sangat tepat namun alakangkah baiknya konten – konten yang memang pada dasarnya sudah terlihat buruk lebih baik diberhentikan sebelum kekuatan rating menghalangi konten tersebut untuk diberhentikan dan KPI harus lebih

bisa “tebang pilih” mana mana saja yang konteks mana yang harus diberi peringatan sehingga stasiun televisi tidak sembarang menyensor segala yang mengunsur belahan, kekerasan atau perpeloncoan yang pada ujungnya seperti salah target sensor.

Dan untuk saran dari peneliti bagi KPI untuk lebih aktif melibatkan masyarakat dalam melakukan kinerjanya dengan pelibatan masyarakat dinilai peneliti akan lebih efektif ketimbang hanya bekerja sendiri dan KPI akan lebih banyak mendapat feedback dari masyarakat mengenai tayangan yang tidak layak konsumsi dan untuk saran independensi harus lebih sering mengevaluasi rutin kinerja lembaganya agar bisa dilihat langkah yang diambil tidak dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk ketidak independensian lembaga tersebut.dan saran untuk peneliti yang ingin meneliti hal yang serupa lebih diperdalam pada variabel kinerja KPI pusat hal ini dikarenakan pada dewasa ini KPI pusat sedang dipetanyakankan dan dimata masyarakat terutama yang melek media masih memandang KPI pusat sebagai lembaga yang tidak berfungsi semestinya sebagai regulator dan penyiaran televisi dan untuk peneliti selajutnya jika ingin meneleti hal yang serupa maka gunakan metode penelitian Forum Group Descusion atau Penelitian kualitatif sehingga jawaban yang akan didapatkan lebih rincih.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Afifi, Subhan. 2009. *Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia*(Jurnal). Yogyakarta : Universitas Pembangunan Nasional " Veteran" Yogyakarta

Amalia, Audy. 2015. *UPAYA TIM PRODUKSI PROGRAM TELEVISI PESBUKERS DALAM MEMINIMALISIR TEGURAN KPI*. Jakarta : Universitas Bakrie.

Hady, Achmad Sofyan. 2012. *Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Acara Silet pada Stasiun RCTI* (Skripsi).Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Irawan, Rahmat Edi. 2013. *PENTINGNYA PENONTON AKTIF DI ERA INDUSTRI TELEVISI INDONESIA SAAT INI*(jurnal). Jakarta : *Binus University*

Identitas Penulis

1. Identitas Penulis Pertama
    a. Nama Lengkap : Syauqi Khairusy Ramadhana
    b. Nomor Induk Mahasiswa : 13321081
    c. Tempat Tanggal Lahir : Bontang, 2 Maret 1995
    d. Program Studi : Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
    e. Bidang Minat Studi : Komunikasi Strategis
    f. Alamat dan Nomor Kontak : Pondok Anggoro No. A12, Kimpulan 3 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

2. Identitas Penulis Kedua
    a. Nama Lengkap dan Gelar Akademik : Ahmad Muntaha, S.Sos, M.A.
    b. NIK / NIDN : 0527056401
    c. Jabatan Akademik : Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.
    d. Alamat dan Nomor Kontak : Yogyakarta / 08122789128.